



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI

PENGUATAN PENGAWASAN



PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

AREA PENGUATAN PENGAWASAN

MONITORING PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DAFTAR ISI

- 1. SK Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan MKRI**
- 2. Gambar CCTV Kamera Pengawasan/Pengendalian Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi**
- 3. SOP Pengelolaan Pelaporan Penerimaan Gratifikasi MK**
- 4. Nota Dinas Layanan Mahkamah Konstitusi yang bersih, Anti Korupsi dan Gratifikasi Kepada Fakultas/Universitas**
- 5. Nota Dinas Layanan Mahkamah Konstitusi yang bersih, Anti Korupsi dan Gratifikasi Kepada Organisasi/Profesi**
- 6. Nota Dinas Layanan Mahkamah Konstitusi yang bersih, Anti Korupsi dan Gratifikasi Badan Usaha/ Perusahaan**
- 7. Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020**
- 8. Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi 2021**
- 9. Laporan Pengendalian Gratifikasi Buku Perpustakaan MK**
- 10. Penyampaian Telaah Pemberian Buku Bapak Prof. O.C. Kaligis**
- 11. Formulir Pelaporan Gratifikasi di Puslitka berupa penolakan Buku**
- 12. Whistleblowing System pada laman MK**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26.10 TAHUN 2018

TENTANG TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa telah diubahnya struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam Pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
 2. Melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian gratifikasi dengan instansi terkait;
 3. Melakukan pembinaan, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi;
 4. Memberikan apresiasi terhadap pelaporan gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 2. Melakukan analisa terhadap gratifikasi yang dilaporkan pada UPG;
 3. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis gratifikasi dengan instansi terkait;
 4. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan pengendalian gratifikasi;

5. Melaksanakan program pengendalian gratifikasi yang telah ditetapkan;
6. Membuat laporan hasil kerja per bulan kepada Sekretaris Jenderal .

- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.4 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

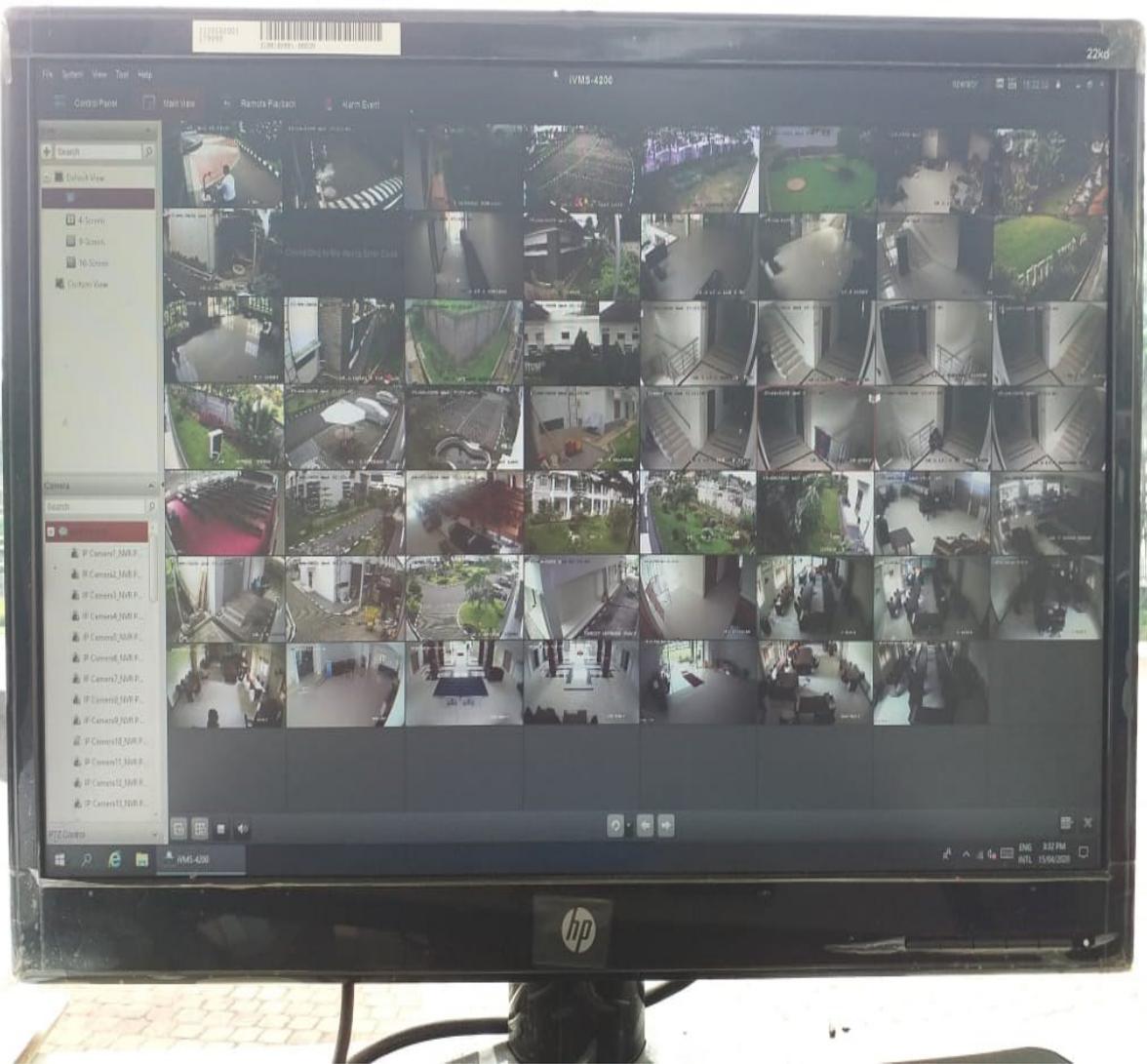
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Yth. Menteri Keuangan;
6. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Yth. Kepala Bagian Keuangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS JENDERAL,



M Guntur Hamzah





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT

	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Inspektur NAMA : Tatang Garjito NIP : 19670513 198802 1 001
NAMA SOP	:	PENGLOLAAN PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 04 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Peraturan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 26.10 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan. 		<ol style="list-style-type: none"> Mampu mengoperasikan komputer Memiliki pemahaman mengenai komputer Memiliki pemahaman alur pelaksanaan dalam unit pengendalian gratifikasi 	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		<ol style="list-style-type: none"> Surat Tugas, Kartu Penugasan Penetapan Kinerja. Komputer dan Kelengkapannya. 	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila kegiatan di dalam SOP ini terlambat atau tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan penerimaan pelaporan gratifikasi akan tertunda.		Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak.	

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pelapor	UPG	Staf TU	Inspektur	Sekjen		Waktu	Output	
1	Mengisi form pelaporan penerimaan gratifikasi							30 menit	Form Pelaporan Gratifikasi	
2	Penerimaan barang gratifikasi dari pelapor kepada UPG						Form Pelaporan Gratifikasi	15 menit	Berita Acara Serah Terima Barang Gratifikasi	
3	Analisa status barang gratifikasi						Form Pelaporan Gratifikasi, Berita Acara Serah Terima Barang Gratifikasi	5 hari	Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Konsep Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan Gratifikasi, Konsep Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	
4	Persetujuan atas hasil tertulis identifikasi tindak lanjut pelaporan gratifikasi						Form Pelaporan Gratifikasi, Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Konsep Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan Gratifikasi.	1 hari	Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	
5	Persetujuan atas konsep surat apresiasi pelaporan gratifikasi						Form Pelaporan Gratifikasi, Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan Gratifikasi, Konsep Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	2 hari	Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	
6	Menindaklanjuti hasil gratifikasi sesuai hasil analisa; melaporkan kepada KPK melalui aplikasi GOL						Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Hasil Analisa Pelaporan Penerimaan Gratifikasi.	1 hari	Printout bukti pelaporan	
7	Menerima surat apresiasi pelaporan gratifikasi dan salinan hasil analisa UPG.						Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi, Salinan hasil analisis laporan penerimaan.	1 hari		
8	Mengarsipkan dokumen (asli dan salinan)						Form Pelaporan Gratifikasi, Berita Acara Serah Terima Barang Gratifikasi, Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan, Salinan Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi.	10 menit		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1510/PW.01/07/2020

29 Juli 2020

Sifat : Penting

Hal : Layanan Mahkamah Konstitusi yang Bersih, Anti Korupsi dan Gratifikasi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Mahkamah Konstitusi (*good judiciary governance*), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memberikan layanan prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip dan nilai-nilai Mahkamah Konstitusi, serta kode etik pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mahkamah Konstitusi menjaga integritas dan memberikan layanan yang tanpa dipungut biaya (*gratis*), bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, pungutan liar, praktik percaloan, dan diskriminasi, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Kami mohon bantuan dan/atau dukungan dari seluruh pihak untuk tidak memberikan dan/atau menjanjikan materi/uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Jika ditemukan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan semangat layanan bersih, anti korupsi dan gratifikasi, serta layanan prima yang ditunjukkan oleh pejabat/pegawai Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat melaporkan kepada kami melalui sarana saluran pengaduan pada www.mkri.id atau surat elektronik ke:

- a. Email pengaduan@mkri.id
- b. *Whistleblowing System MK* <https://wbs.mkri.id/>
- c. Pesan singkat secara Elektronik (SMS) 0812101k7130
- d. Kotak Pengaduan Lobby Lt. Dasar Gedung MK
- e. Kotak Pos PO BOX 999 Jakarta 10000

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., MH.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Panitera serta Pejabat Struktural dan Fungsional MKRI;
4. Yth. Seluruh Pegawai MKRI.



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk-143823017200729090725

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran
Nomor : 1510/PW.01/07/2020
Tanggal : 29 Juli 2020

Kepada Yth.:

PERGURUAN TINGGI

1. Rektor Universitas Al Asyariah Mandar
2. Rektor Universitas Airlangga
3. Rektor Universitas Andalas
4. Rektor Universitas Brawijaya
5. Rektor Universitas Bung Hatta
6. Rektor Universitas Diponegoro
7. Rektor Universitas Gadjah Mada
8. Rektor Universitas Hasanuddin
9. Rektor Universitas Indonesia
10. Rektor Universitas Islam Malang
11. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
12. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
13. Rektor Universitas Jambi
14. Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
15. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
16. Rektor Universitas Muria Kudus
17. Rektor Universitas Negeri Jakarta
18. Rektor Universitas Negeri Papua
19. Rektor Universitas Negeri Semarang
20. Rektor Universitas Padjajaran
21. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran
22. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
23. Rektor Universitas Santo Paulus
24. Rektor Universitas Sriwijaya
25. Rektor Universitas Sumatera Utara
26. Rektor Universitas Tarumanagara
27. Rektor Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia
28. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
29. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
30. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
31. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam
32. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
33. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo
34. Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih
35. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
36. Dekan Fakultas Hukum Universitas Haluleo
37. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
38. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
39. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi
40. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
41. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
42. Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun
43. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
44. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



45. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
46. Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
47. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram
48. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
49. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
50. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
51. Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
52. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
53. Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura
54. Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau
55. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
56. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
57. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
58. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
59. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
60. Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
61. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako
62. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
63. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
64. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana
65. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1511/PW.01/07/2020

29 Juli 2020

Sifat : Penting

Hal : Layanan Mahkamah Konstitusi yang Bersih, Anti Korupsi dan Gratifikasi

Yth. Pimpinan Organisasi/Profesi (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Mahkamah Konstitusi (*good judiciary governance*), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memberikan layanan prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip dan nilai-nilai Mahkamah Konstitusi, serta kode etik pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mahkamah Konstitusi menjaga integritas dan memberikan layanan yang tanpa dipungut biaya (gratis), bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, pungutan liar, praktik percaloan, dan diskriminasi, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Kami mohon bantuan dan/atau dukungan dari seluruh pihak untuk tidak memberikan dan/atau menjanjikan materi/uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Jika ditemukan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan semangat layanan bersih, anti korupsi dan gratifikasi, serta layanan prima yang ditunjukkan oleh pejabat/pegawai Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat melaporkan kepada kami melalui sarana saluran pengaduan pada www.mkri.id atau surat elektronik ke:

- a. Email pengaduan@mkri.id
- b. Whistleblowing System MK <https://wbs.mkri.id/>
- c. Pesan singkat secara Elektronik (SMS) 08121017130
- d. Kotak Pengaduan Lobby Lt. Dasar Gedung MK
- e. Kotak Pos PO BOX 999 Jakarta 10000

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., MH.

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Panitera serta Pejabat Struktural dan Fungsional MKRI;
4. Yth. Seluruh Pegawai MKRI.



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk-143823017200729090513

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran
Nomor : 1511/PW.01/07/2020
Tanggal : 29 Juli 2020

Kepada Yth.:

ORGANISASI/PROFESI

1. Ketua Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)
2. Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Indonesia
3. Ketua Dewan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
4. Ketua Dewan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)
5. Ketua Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 1973
6. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia
7. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
8. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
9. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja BUMN
10. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
11. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia
12. Ketua Nasional Konfederasi Serikat Nusantara (KSN)
13. Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
14. Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
15. Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia
16. Ketua Umum Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
17. Ketua Umum Ikatan Surveyor Indonesia
18. Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI)
19. Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
20. Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN KSBDSI)
21. Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
22. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
23. Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia
24. Ketua Umum Perempuan Khonghucu Indonesia
25. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
26. Ketua Umum Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)
27. Ketua Umum Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara (Peradan)
28. Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia
29. Ketua Umum Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI)
30. Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
31. Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)
32. Ketua Umum Persatuan Wanita Kristen Indonesia
33. Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
34. Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia
35. Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
36. Ketua Umum Wanita Buddhis Indonesia
37. Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia
38. Ketua Umum Wanita Syarikat Islam
39. Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia
40. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)
41. Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI)





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1512/PW.01/07/2020

29 Juli 2020

Sifat : Penting

Hal : Layanan Mahkamah Konstitusi yang Bersih, Anti Korupsi dan Gratifikasi

Yth. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Mahkamah Konstitusi (*good judiciary governance*), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memberikan layanan prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip dan nilai-nilai Mahkamah Konstitusi, serta kode etik pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mahkamah Konstitusi menjaga integritas dan memberikan layanan yang tanpa dipungut biaya (*gratis*), bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, pungutan liar, praktik percaloan, dan diskriminasi, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Kami mohon bantuan dan/atau dukungan dari seluruh pihak untuk tidak memberikan dan/atau menjanjikan materi/uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Jika ditemukan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan semangat layanan bersih, anti korupsi dan gratifikasi, serta layanan prima yang ditunjukkan oleh pejabat/pegawai Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat melaporkan kepada kami melalui sarana saluran pengaduan pada www.mkri.id atau surat elektronik ke:

- a. Email pengaduan@mkri.id
- b. *Whistleblowing System MK* <https://wbs.mkri.id/>
- c. Pesan singkat secara Elektronik (SMS) 08121017130
- d. Kotak Pengaduan Lobby Lt. Dasar Gedung MK
- e. Kotak Pos PO BOX 999 Jakarta 10000

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Panitera serta Pejabat Struktural dan Fungsional MKRI;
4. Yth. Seluruh Pegawai MKRI.



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
[mk-143823017200729090328](https://www.mkri.id)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran
Nomor : 1512/PW.01/07/2020
Tanggal : 29 Juli 2020

Kepada Yth.:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

1. Pimpinan Forum Konstitusi
2. Pimpinan Indonesia Corruption Watch
3. Pimpinan Indonesia Legal Round Table
4. Pimpinan Komite Independen Pemantau Pemilu
5. Pimpinan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif
6. Pimpinan Leimena Institute
7. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
8. Pimpinan Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia
9. Pimpinan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi
10. Pimpinan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
11. Pimpinan Setara Institute
12. Pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1513/PW.01/07/2020

29 Juli 2020

Sifat : Penting

Hal : Layanan Mahkamah Konstitusi yang Bersih, Anti Korupsi dan Gratifikasi

Yth. Pimpinan Badan Usaha (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Mahkamah Konstitusi (*good judiciary governance*), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memberikan layanan prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip dan nilai-nilai Mahkamah Konstitusi, serta kode etik pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mahkamah Konstitusi menjaga integritas dan memberikan layanan yang tanpa dipungut biaya (*gratis*), bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, pungutan liar, praktik percaloan, dan diskriminasi, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Kami mohon bantuan dan/atau dukungan dari seluruh pihak untuk tidak memberikan dan/atau menjanjikan materi/uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Jika ditemukan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan semangat layanan bersih, anti korupsi dan gratifikasi, serta layanan prima yang ditunjukkan oleh pejabat/pegawai Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat melaporkan kepada kami melalui sarana saluran pengaduan pada www.mkri.id atau surat elektronik ke:

- a. Email pengaduan@mkri.id
- b. *Whistleblowing System* MK <https://wbs.mkri.id/>
- c. Pesan singkat secara Elektronik (SMS) 08121017130
- d. Kotak Pengaduan Lobby Lt. Dasar Gedung MK
- e. Kotak Pos PO BOX 999 Jakarta 10000

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., MH.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Panitera serta Pejabat Struktural dan Fungsional MKRI;
4. Yth. Seluruh Pegawai MKRI.



Sekretaris Jenderal

M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001

Digital Signature

mk-143823017200729090148

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Lampiran
Nomor : 1513/PW.01/07/2020
Tanggal : 29 Juli 2020

Kepada Yth.:

BADAN USAHA/PERUSAHAAN:

1. Direktur Utama BPJS Kesehatan
2. Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
3. Direktur Utama Perum Percetakan Negara
4. Direktur Utama PT Adhimukti Inti
5. Direktur Utama PT Airkon Pratama
6. Direktur Utama PT Angkasa Puratelametro
7. Direktur Utama PT Astra Graphia (Axiqoe)
8. Direktur Utama PT Astragrphia Xprins Indonesia
9. Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia
10. Direktur Utama PT Auditel Support Asia
11. Direktur Utama PT Avant Solusi Servispro
12. Direktur Utama PT Bank DKI
13. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia
14. Direktur Utama PT Batemuri Tours
15. Direktur Utama PT Berca Schindler Lift
16. Direktur Utama PT Bhinneka Mentaridimensi
17. Direktur Utama PT Bimasakti Cahaya Abadi
18. Direktur Utama PT Bina Media Tenggara
19. Direktur Utama PT Brainmatics Cipta Informatika
20. Direktur Utama PT Calmic Indonesia
21. Direktur Utama PT Cipta Alpha Omega
22. Direktur Utama PT Cipta Mega Kencana
23. Direktur Utama PT Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV)
24. Direktur Utama PT Citra Media Nusa Purnama
25. Direktur Utama PT Cyber Network Indonesia
26. Direktur Utama PT Datascript (e-catalog)
27. Direktur Utama PT Delta Sinkron Lestari
28. Direktur Utama PT Digivla Indonesia
29. Direktur Utama PT Dynamo Media Network
30. Direktur Utama PT Educipta Permata Mandiri
31. Direktur Utama PT Furnimaxx
32. Direktur Utama PT Gemilang Indoraya Abadi
33. Direktur Utama PT Gifera Odo Teknologi
34. Direktur Utama PT Hacktivate Teknologi Indonesia
35. Direktur Utama PT Indobara Bahana
36. Direktur Utama PT Indocare Pacific
37. Direktur Utama PT Indonusa Telemedia
38. Direktur Utama PT Indosiar Visual Mandiri
39. Direktur Utama PT Indra Giri Pradana
40. Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia
41. Direktur Utama PT Inixindo Persada Rekayasa Komputer
42. Direktur Utama PT Inkoneksi Izi Konsultan
43. Direktur Utama PT Justika Siar Publika (hukumonline)
44. Direktur Utama PT Kintamani Tours & Travel



45. Direktur Utama PT Kone
46. Direktur Utama PT Lativi Media Karya (TV ONE)
47. Direktur Utama PT Lido Jaya Perkasa
48. Direktur Utama PT Lintas Data Indonesia
49. Direktur Utama PT Media Televisi Indonesia
50. Direktur Utama PT Media Visual
51. Direktur Utama PT Metropolitan Bayutama
52. Direktur Utama PT MGTE
53. Direktur Utama PT Mitsindo Visual Pratama
54. Direktur Utama PT Mitra Trustindo Utama
55. Direktur Utama PT MNC Televisi Network
56. Direktur Utama PT Mulse Citra Nusa
57. Direktur Utama PT Myacico Global Indonesia
58. Direktur Utama PT Narasi Citra Sahwahita
59. Direktur Utama PT Net Mediatama Indonesia
60. Direktur Utama PT Nusantara Compnet Integrator
61. Direktur Utama PT Pacto Convex
62. Direktur Utama PT Perdana Matriks Intersistem
63. Direktur Utama PT Pos Indonesia
64. Direktur Utama PT Prodia
65. Direktur Utama PT Rekabio
66. Direktur Utama PT Rentokil Indonesia
67. Direktur Utama PT Republika Media Mandiri
68. Direktur Utama PT Rorica Jaya Abadi
69. Direktur Utama PT Satya Purnama
70. Direktur Utama PT Serasi Autoraya
71. Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka
72. Direktur Utama PT Sinergi Meta Data
73. Direktur Utama PT Surya Citra Media Tbk
74. Direktur Utama PT Taspen
75. Direktur Utama PT Tazinat Caligraphy
76. Direktur Utama PT Teknika Inti Perkasa
77. Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
78. Direktur Utama PT TM Sentosa
79. Direktur Utama PT Trans News Corpora
80. Direktur Utama PT Trans Pasific Global
81. Direktur Utama PT Trikreasindo Mandiri Sentosa
82. Direktur Utama PT Tri Mega Indo Abyudaya
83. Direktur Utama PT Turbo Mitra Perkasa
84. Direktur Utama PT TVRI
85. Direktur Utama PT Wahana Ekonomi Semesta
86. Direktur CV Anugerah Utama
87. Direktur CV Anugrah Pratama (e-catalog)
88. Direktur CV Arirang
89. Direktur CV Bangun jaya Mandiri
90. Direktur CV Bengawan Mitra Sakti
91. Direktur CV Garnis
92. Direktur CV Hamparan
93. Direktur CV Hamparan Artha Citra
94. Direktur CV Inti Guna
95. Direktur CV Irma Lestari
96. Direktur CV Kirana Sanjaya



97. Direktur CV Lestari Medika
98. Direktur CV Makassar Grafika
99. Direktur CV Mitra Karpet
100. Direktur CV Nadafira
101. Direktur CV Pratama Sakti Internusa
102. Direktur CV Putra Jasindo Bersaudara
103. Direktur CV Rejeki Sentosa
104. Direktur CV Sono Kembang
105. Direktur CV Surya Grindulu Mandiri
106. Direktur CV Telaga Jati Abadi
107. Direktur CV Tri Ayu Lestari
108. Direktur British Council
109. Direktur ID-Networkers
110. Direktur Narasi TV
111. Direktur Pesona Bonsai
112. Direktur PPM Manajemen
113. Direktur Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto
114. Direktur Tempo Institute
115. Pimpinan Apurva Kempinski Bali
116. Pimpinan Alra Lifesyle
117. Pimpinan Awan Teknik
118. Pimpinan Deo Entertainment
119. Pimpinan Desra Translation
120. Pimpinan Fame Hotel Gading Serpong
121. Pimpinan Hilton Nusa Dua Bali
122. Pimpinan Jakarta Translation Agency
123. Pimpinan JHL Solitaire Hotel Gading Serpong
124. Pimpinan Koperasi Konstitusi
125. Pimpinan Mitra Bahasa Indonesia
126. Pimpinan Okegenius
127. Pimpinan Saung Angklung Udjo
128. Pimpinan SKY Visa and Immigration Services
129. Pimpinan Tentrem Hotel Yogyakarta
130. Pimpinan VFS Global
131. Pimpinan Waterproofing system





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 953/2900/PW.02.03/12/2020

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal

Dari : Inspektur

Hal : Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi untuk Periode Desember 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

Dengan hormat, berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 493/2900/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melakukan monitoring atas Pelaporan Gratifikasi untuk periode Desember 2020. Kami sampaikan bahwa pada Desember 2020 laporan yang diterima UPG sebagai berikut:

No	Media Pelaporan	Jumlah	Tindak Lanjut	
			Diteruskan KPK	Dikelola UPG
1	Langsung (Ruang Kerja Inspektorat)	1	1	0
2	Aplikasi SIKD	0	0	0
3	Email UPG (upg@mkri.id)	0	0	0
TOTAL		1	1	0

Berdasarkan data di atas, kami informasikan bahwa untuk periode Desember 2020, UPG menerima 1 (satu) pelaporan gratifikasi, sebagai berikut:

1. Laporan dari 1 orang pegawai Poliklinik pada 8 Desember 2020 secara langsung di ruang kerja Inspektorat terkait penerimaan gratifikasi berupa uang tunai senilai Rp150.000,00. Atas pelaporan tersebut telah dilakukan telaah awal oleh UPG MK pada tanggal 16 Desember 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) pada tanggal 23 Desember 2020.



Perlu kami sampaikan pula selama periode Januari sampai dengan Desember 2020 UPG telah menerima 15 (lima belas) laporan gratifikasi dari Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kami selaku UPG mengapresiasi keaktifan Pejabat dan Pegawai yang telah menjaga integritas dengan melaporkan penolakan dan penerimaan gratifikasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan jabatan dan kewajibannya melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh UPG.

Demikian kami sampaikan laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk periode Desember 2020. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Inspektur,
Budi Achmad Djohari



Inspektur
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002
Digital Signature
[mk1668050617201230044757](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 149/2900/PW.02.03/05/2021

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal
Dari : Inspektur
Hal : Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi untuk Periode April 2021
Tanggal : 07 Mei 2021

Dengan hormat, berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 139.1/2900/05/2021 tanggal 3 Mei 2021, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melakukan monitoring atas Pengendalian Gratifikasi untuk periode April 2021. Kami sampaikan bahwa pada April 2021 laporan yang diterima UPG sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode April 2021

No	Media Pelaporan	Jumlah	Tindak Lanjut	
			Diteruskan KPK	Dikelola UPG
1	Langsung (Ruang Kerja Inspektorat)	1	0	1
2	Aplikasi SIKD	0	0	0
3	Email UPG (upg@mkri.id)	0	0	0
TOTAL		1	0	1

Berdasarkan data di atas, kami informasikan bahwa untuk periode April 2021, UPG menerima 1 (satu) pelaporan gratifikasi, sebagai berikut:

1. Laporan dari Bapak M. Guntur Hamzah selaku Sekretaris Jenderal pada 23 April 2021 yang diwakili oleh sdr. Haifa Arief Lubis di ruang kerja Inspektorat terkait penerimaan gratifikasi souvenir kegiatan audiensi dari Bank BRI berupa 1 (satu) plakat dan 2 (dua) kartu Brizzi yang diperkirakan bernilai Rp640.000,00. Atas pelaporan tersebut telah dilakukan telaah awal oleh UPG pada 30 April 2021 dengan hasil **dikelola oleh instansi**



Perlu kami sampaikan pula, selama periode Januari s.d. April 2021, UPG telah menerima 7 (tujuh) laporan gratifikasi dari Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, dengan detail sebagai berikut:

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Gratifikasi Januari s.d. April 2021

No	Media Pelaporan	Jumlah	Tindak Lanjut	
			Diteruskan KPK	Dikelola UPG
1	Langsung (Ruang Kerja Inspektorat)	7	0	7
2	Aplikasi SIKD	0	0	0
3	Email UPG (upg@mkri.id)	0	0	0
TOTAL		7	0	7

UPG mengapresiasi keaktifan Pejabat dan Pegawai yang telah menjaga integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan jabatan dan kewajibannya melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh UPG.

Demikian kami sampaikan laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk periode April 2021. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Inspektur,
Budi Achmad Djohari



**LAPORAN REKAPITULASI PELAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

s.d. Desember 2020

No	Unit Kerja Pelapor	Tanggal Penerimaan/Penolakan	Jenis Penerimaan/ Penolakan	Keterangan	Status (Diteruskan KPK/Dikelola oleh UPG)
1	Inspektorat	20 Desember 2018	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
2	Inspektorat	20 Desember 2018	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
3	Kepaniteraan	20 Desember 2018	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
4	Kepaniteraan	09 Januari 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
5	Biro Umum	17 Januari 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
6	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	07 Februari 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
7	Biro Humas dan Protokol	14 Februari 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
8	Biro Humas dan Protokol	14 Februari 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
9	Sekretaris Jenderal	25 Februari 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
10	Sekretaris Jenderal	27 Februari 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
11	Kepaniteraan	28 Februari 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
12	Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	28 Februari 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
13	Sekretaris Jenderal	01 Maret 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
14	Sekretaris Jenderal	04 Maret 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
15	Inspektorat	05 Maret 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
16	Sekretaris Jenderal	23 Maret 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
17	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	12 April 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
18	Sekretaris Jenderal	25 April 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
19	Sekretaris Jenderal	04 Mei 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
20	Panitera	05 Mei 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
21	Sekretaris Jenderal	08 Mei 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
22	Ketua Mahkamah Konstitusi	09 Mei 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
23	Sekretaris Jenderal	28 Mei 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
24	Sekretaris Jenderal	13 Juni 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK

25	Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	19 September 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
26	Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	19 September 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
27	Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	19 September 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
28	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	07 Oktober 2019	Penerimaan		Diteruskan KPK
29	Sekretaris Jenderal	04 November 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
30	Kepaniteraan	04 November 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
31	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	15 November 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
32	Sekretaris Jenderal	16 Desember 2019	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
33	Biro Umum	03 Januari 2020	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
34	Biro Humas dan Protokol	06 Januari 2020	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
35	Biro Humas dan Protokol	10 Januari 2020	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
36	Sekretaris Jenderal	12 Januari 2020	Penerimaan		Diteruskan KPK
37	Pusat TIK	15 Januari 2020	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
38	Biro Humas dan Protokol	20 Januari 2020	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
39	Sekretaris Jenderal	26 Februari 2020	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
40	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	13 Maret 2020	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
41	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	29 Juni 2020	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
42	Kepaniteraan	01 Juli 2020	Penerimaan		Dikelola oleh UPG
43	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	23 September 2020	Penerimaan		Diteruskan KPK
44	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	23 Maret 2020	Penerimaan		Diteruskan KPK
45	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	23 Maret 2020	Penerimaan		Diteruskan KPK
46	Sekretaris Jenderal	5 Oktober 2020	Penerimaan		Diteruskan KPK
47	Sekretaris Jenderal	6 Oktober 2020	Penerimaan		Diteruskan KPK

JUDUL BUKU SUMBANGAN OC KALIGIS UNTUK PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	JUDUL	PENGARANG	JML
1	Acara Pemeriksaan Cepat Di PTUN	OC. Kaligis & Associates	1
2	Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 2	OC. Kaligis & Associates	1
3	Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 4	OC. Kaligis & Associates	1
4	Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 5	OC. Kaligis & Associates	1
5	Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 7	OC. Kaligis & Associates	1
6	Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 8	OC. Kaligis & Associates	2
7	Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 11	OC. Kaligis & Associates	1
8	Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 12	OC. Kaligis & Associates	1
9	Arbiter Tunggal	OC. Kaligis & Associates	1
10	Aspek Aspek Hukum Moratorium	OC. Kaligis & Associates	1
11	Aspek Hukum Transaksi Derivatif Di Indonesia	OC. Kaligis & Associates	1
12	Bila Advocat menjadi Terpidana	OC. Kaligis & Associates	1
13	Carut Marut Pemilu Legislatif 2014	OC. Kaligis & Associates	1
14	Corruption As A TOC	OC. Kaligis & Associates	1
15	Cross Examination (The Case Of Hendra Rahardja)	OC. Kaligis & Associates	2
16	Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik	OC. Kaligis & Associates	2
17	Deponering Teori dan Praktik	OC. Kaligis & Associates	1
18	Freedom Of Religio Legality	OC. Kaligis & Associates	1
19	HAM dan Peradilan HAM	OC. Kaligis & Associates	1
20	Hukum Sepakbola	OC. Kaligis & Associates	1
21	Hukum Dan Sepakbola 1	OC. Kaligis & Associates	1
22	Hukum Dan Sepakbola 2	OC. Kaligis & Associates	1
23	Human Rights & Terrorism	OC. Kaligis & Associates	1
24	Kaligis Diadili	OC. Kaligis & Associates	1
25	Kasus Kasus Limbah	OC. Kaligis & Associates	1
26	Kasus Kebakaran Hutan	OC. Kaligis & Associates	2
27	Kasus-Kasus Perbankan di Peradilan Indonesia	OC. Kaligis & Associates	1
28	Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi	OC. Kaligis & Associates	1
29	Koin Peduli Prita	OC. Kaligis & Associates	1
30	Kontrak Bisnis Teori dan Praktik 1	OC. Kaligis & Associates	1
31	Kontrak Bisnis Teori dan Praktik 2	OC. Kaligis & Associates	2
32	Korupsi Bibit & Chandra	OC. Kaligis & Associates	1
33	KPK Bukan Malaikat Jilid 1	OC. Kaligis & Associates	1
34	KPK Bukan Malaikat Jilid 2	OC. Kaligis & Associates	1
35	KPK Bukan Malaikat Jilid 3	OC. Kaligis & Associates	1
36	Kumpulan Kasus Menarik Jilid 4	OC. Kaligis & Associates	1
37	Kumpulan Kasus Menarik Jilid 5	OC. Kaligis & Associates	1
38	Kumpulan Putusan Perkara Praperadilan 5	OC. Kaligis & Associates	1
39	Legal Writings Anthology Volume 9	OC. Kaligis & Associates	1
40	M. Nazaruddin Jangan Saya Direkayasa Politik & Dianiaya	OC. Kaligis & Associates	2
41	MA VS KY di Mahkamah Konstitusi	OC. Kaligis & Associates	1
42	Masihkah Bumi Indonesia Milik Kita Buku I	OC. Kaligis & Associates	1
43	Masihkah Bumi Indonesia Milik Kita Buku II	OC. Kaligis & Associates	2
44	Mereka Yang Kebal Hukum	OC. Kaligis & Associates	1
45	Misteri Tragedi Trisakti	OC. Kaligis & Associates	1
46	Narkoba Dan Peradilannya di Indonesia	OC. Kaligis & Associates	1
47	National and International Rounds Of Philip C. Jessup International Law Mood Court Competition 2007	OC. Kaligis & Associates	1
48	Pak Harto Sisi Sisi Yang Terlupakan	OC. Kaligis & Associates	1

49	Partai Golkar Digugat	OC. Kaligis & Associates	1
50	Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	OC. Kaligis & Associates	1
51	Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana	OC. Kaligis & Associates	1
52	Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik dalam Prakteknya	OC. Kaligis & Associates	1
53	Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi	OC. Kaligis & Associates	2
54	Peradilan Politik HAM di Indonesia 1	OC. Kaligis & Associates	1
55	Peradilan Politik HAM di Indonesia 2	OC. Kaligis & Associates	1
56	Peradilan Sesat	OC. Kaligis & Associates	1
57	Perjuangan Hukum Guntur	OC. Kaligis & Associates	1
58	Perkara Bea Cukai Pajak Di peradilan Umum	OC. Kaligis & Associates	1
59	Perkara Koneksitas	OC. Kaligis & Associates	1
60	Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan Jilid 1	OC. Kaligis & Associates	1
61	Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan Jilid 2	OC. Kaligis & Associates	1
62	Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana	OC. Kaligis & Associates	1
63	Petunjuk Peninjauan Kembali	OC. Kaligis & Associates	1
64	PKI dalam Politik Kekerasan	OC. Kaligis & Associates	1
65	Pra Peradilan Dalam Kenyataan	OC. Kaligis & Associates	1
66	Praktek Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Buku 1	OC. Kaligis & Associates	1
67	Praktek Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Buku 2	OC. Kaligis & Associates	1
68	Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Buku 3	OC. Kaligis & Associates	1
69	Praktik Praperadilan dari Waktu ke Waktu	OC. Kaligis & Associates	1
70	Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid 1	OC. Kaligis & Associates	1
71	Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid 2	OC. Kaligis & Associates	1
72	Prevention On Maritime Pollution & Piracy Under International Law	OC. Kaligis & Associates	1
73	Protection On Minority Peoples Under International Law & Immunity Of Diplomatic Missions	OC. Kaligis & Associates	1
74	Puzzle Of David's Case	OC. Kaligis & Associates	1
75	Requisitoir Bebas Dalam Perkara Pidana	OC. Kaligis & Associates	1
76	Sengketa Sipadan Ligitan Mengapa Kita Kalah	OC. Kaligis & Associates	1
77	Serba Serbi Kasus Menarik 3	OC. Kaligis & Associates	1
78	Simtom Politik 1965	OC. Kaligis & Associates	1
79	State Succession, Forced Labour, and Indigenous Peoples Under International Law	OC. Kaligis & Associates	1
80	Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia	OC. Kaligis & Associates	1
81	Teori Praktik Merk dan Hak Cipta	OC. Kaligis & Associates	1
82	The Birth Of A Convention	OC. Kaligis & Associates	1
83	The Birth A Convention Againts Corruption	OC. Kaligis & Associates	1
84	The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition In Indonesia	OC. Kaligis & Associates	1
85	The Politicization of the Nation's Banking Case	OC. Kaligis & Associates	1
86	Tommy Soeharto Menggapai Keadilan	OC. Kaligis & Associates	1
87	Wiranto Menghadapi Dakwaan Asing	OC. Kaligis & Associates	1
	JUDUL BUKU KARYA LAIN		
88	Campur Sari Perjalanan Hidup Bangsa Indonesia	Ismail Saleh	1
89	The Kaligis Succes Factor	Anand Krishna	1
90	Sang Guru	Y.B. Purwaning M. Yanuar	1
	JUMLAH		98



**OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**

Jalan Majapahit 18-20
Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 - Indonesia
Phone : 3453992 - 3453994 - 3853250 (5 Lines)
Fax : (021) 3808193 - 3805181
Email : ock@ocklaw.com
Website : www.ocklaw.com

Jakarta, 29 Juli 2021
No. 218/OCK.VII/2021

Kepada Yth.
**Perpustakaan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, RT. 2/RW. 3
Jakarta Pusat**

Hal : Pemberian Buku Untuk Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis memberikan buku hasil karya saya seperti CORRUPTION AS A TOC, M. Nazaruddin "Jangan Saya Direkayasa Politik & Dianiaya" dan beberapa karya buku lainnya yang saya buat berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang Pengacara. Dengan pemberian buku-buku ini, saya harap bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi tentang Hukum di Indonesia.

Demikianlah surat ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor 288/2900/PW.02.00/08/2021

Kepada Yth. : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Dari : Inspektur
Perihal : Penyampaian Hasil Telaah atas Pemberian Buku dari Bapak Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis
Tanggal : 26 Agustus 2021

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Nomor 1752/PT.05/08/2021 Perihal Telaah atas Pemberian Buku dari Bapak Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis tertanggal 13 Agustus 2021, kami telah melakukan reviu atas pemberian buku dimaksud, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Pada 30 Juli 2021 telah diterima surat dari Prof. Dr. Otto Cornelius Kaligis kepada Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 218/OCK.VII/2021 dengan perihal Pemberian Buku untuk Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.
2. Terdapat data yang tidak konsisten atas jumlah judul buku yang disampaikan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Puslitka nomor 1734//08/2021 tertanggal, 10 Agustus 2021 jumlah buku yang telah diterima sebanyak 91 judul buku yang terdiri dari 95 eksemplar. Sedangkan berdasarkan *file excel* yang dilampirkan bersama nota dinas tersebut jumlah buku yang diterima sebanyak 89 judul buku yang terdiri dari 95 eksemplar.
3. Merujuk pada data dari e-minutasi bahwa terdapat perkara nomor 41/PUU-XIX/2021 dengan Pemohon Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. yang diregistrasi pada 12 Agustus 2021.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas menurut hemat kami penerimaan buku dari Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis tersebut terindikasi mengandung gratifikasi, karena yang bersangkutan sedang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, penerimaan buku tersebut mohon segera dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan terlebih dahulu ditung kembali jumlah buku yang diterima.

Demikian hasil reviu ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari

Tembusan Yth:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Inspektur
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002
Digital Signature
[mk-1920055008210825023133](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI

Jenis Pelaporan : Penolakan Gratifikasi
Melaporkan sebagai : Mewakili Unit Kerja

IDENTITAS PELAPOR

Nama : Kurniasih Panti Rahayu
No. KTP (NIK) : 3173027005670002
Tempat & Tanggal Lahir : Banda Aceh, 30 Mei 1967
Jabatan : Kepala Pusat penelitian dan pengkajian Perkara, dan pengelolaan Perpustakaan (Puslitka)
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV C
Unit Kerja : Pusat penelitian dan pengkajian Perkara, dan pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI
Alamat Rumah : Jln. Pulo Macan VII No 28 A Rt 006 Rw 005 Tomang Kec. Grogol, Petamburan, Jakarta Barat
Kel/ Desa : Tomang
Kecamatan : Grogol Petamburan
Kab/Kota : Jakarta Barat
Provinsi : DKI Jakarta
Kode Pos : 11440
Alamat E-mail : kurniasih@mkri.id
Nomor Telepon : 0811155614

DATA GRATIFIKASI*)

Jenis Gratifikasi : Buku berjumlah 98 eksemplar terdiri dari 90 judul
Tempat Kejadian : Lantai 8, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, No 6, Jakarta Pusat 10100
Tanggal Kejadian : Jumat, 30 Juli 2021

DATA PEMBERI GRATIFIKASI*)

Nama : Prof. Dr. OC Kaligis
Pekerjaan/Jabatan : Lawyer
Alamat : Jln. Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok 122-123 Jakarta 10160
Hubungan dengan Pelapor : Tidak Ada Hubungan



ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian : Berdasarkan informasi dalam surat Prof. Dr. Otto Cornelius Kaligis Nomor 218/OCK.VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 dengan perihal “Pemberian Buku Untuk Perpustakaan Mahkamah Konstitusi”, pemberian buku diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan informasi hukum di Indonesia

Kronologi Kejadian :

1. Pada tanggal 30 Juli 2021, Puslitka menerima surat dari Otto Cornelis Kaligis Associates Advocates dan Legal Consultants yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Otto Cornelius Kaligis Nomor 218/OCK.VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 dengan perihal : Pemberian Buku Untuk Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (surat terlampir).
2. Kemudian di hari yang sama, pada tanggal 30 Juli 2021 jam 14.00 WIB, petugas Pos mengantar kardus yang berisi buku. Setelah dibuka dan dihitung terdapat 90 judul buku yang terdiri dari 98 eksemplar (foto dan daftar buku terlampir). Buku-buku tersebut sebagian besar karangan dari Prof. Dr. Otto Cornelius Kaligis.
3. Setelah itu kami melaporkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal tentang penerimaan surat dan fisik buku tersebut, atas disposisi beliau kami berkoordinasi/meminta telaah dengan Inspektorat. Hasil telaah Inspektorat yang disampaikan kepada Puslitka, bahwa pemberian buku tersebut terindikasi mengandung gratifikasi, karena yang bersangkutan sedang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu penerimaan buku ini kami laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

02 September 2021

Pelapor

(Kurniasih Panti Rahayu)





Penundaan Pilkada Dianggap Tidak Berdasar, Hasil Pemilihan Gubernur Kalteng Digugat - Selengkapnya

Berita Sidang Berita Non Sidang Berita Populer

Penundaan Pilkada Dianggap Tidak Berdasar, Hasil Pemilihan Gubernur Kalteng Digugat - lebih dari 5 jam yang lalu

Pemungutan Suara Ulang di Mamberamo Raya - lebih dari 16 jam yang lalu

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS Halmahera Selatan - lebih dari 20 jam yang lalu

MK Kukuhkan Mursini dan Halim Pimpin Kuantan Singingi - lebih dari 20 jam yang lalu

Dalil Tidak Relevan, MK Tolak Gugatan PHP Kada Solok Selatan - lebih dari 6 hari yang lalu

Indeks



**BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI
TANPA DI PUNGUT BIAYA**
(free of charge)

Agenda dan Informasi Publik [Pasal 2 ayat (4)] - 10:00 WIB :: Sidang Perkara 1/PUU-XIV/2016 Tentang "Pengujian UU No. 13 Tahun 2

Cari

JADWAL SIDANG

25 Feb
10:00 WIB
Nomor Perkara : 100/PHP.BUP-XIV/2016
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015
Agenda : Pengucapan Putusan

25 Feb
10:00 WIB
Nomor Perkara : 120/PHP.BUP-XIV/2016
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Muna Tahun 2015
Agenda : Pengucapan Putusan

RISALAH SIDANG

23 Feb
10:17 WIB
Nomor Perkara : 2/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U
Agenda : Pemeriksaan Pendahuluan (I)

22 Feb
10:19 WIB
Nomor Perkara : 65/PHP.BUP-XIV/2016
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015

PUTUSAN MK

22 Feb
14:17 WIB
Nomor Perkara : 65/PHP.BUP-XIV/2016
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Tahun 2015
Amar Putusan : Menolak Seluruhnya

22 Feb
10:51 WIB
Nomor Perkara : 1/PHP.BUP-XIV/2016
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015
Amar Putusan : Sela